

# KINERJA BAPPEDA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN

Oleh:

Kurniawan Garamba <sup>1)</sup>

Jonson Sihombing <sup>2)</sup>

Elisabeth Sitepu <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[kurniawangaramba@gmail.com](mailto:kurniawangaramba@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Jonsonsihombing02@gmail.com](mailto:Jonsonsihombing02@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Elisabeth.sitepu@yahoo.com](mailto:Elisabeth.sitepu@yahoo.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*BAPPEDA is one of the components or agencies in the regions that have significant capabilities in structuring regional improvement exercises. If the capacity of this formation is so significant, it can be said that the achievements or disappointments of implementing Structural Coordination in the regions, especially in the territorial period, are not fully resolved by the presentation of Bappeda in completing its capabilities. This study aims to decide: (1) the presentation of Bappeda in working on the nature of structuring progress in Medan City; (2) factors that hinder regional cooperation in any improvements made by Bappeda. This study uses a subjective methodology by taking the setting or exploration area at the Medan City Bappeda Office. The strategy of gathering information is done by using interview, perception and documentation techniques. The results of this study indicate that (1) Medan City Bappeda has shown outstanding performance, as evidenced by the implementation of every effort and capability given to Bappeda. (2) there are several factors that thwart regional support in any improvements made by Bappeda, for example the age factor, the element of training and the business factor.*

**Keywords:** *Bappeda Performance, Participatory and Development Planning.*

## ABSTRAK

BAPPEDA merupakan salah satu komponen atau instansi di daerah yang memiliki kemampuan signifikan dalam latihan penataan peningkatan wilayah. Kemampuan pembentukan ini begitu signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian dari pelaksanaan Koordinasi Penataan di daerah khususnya dalam periode teritorial, sepenuhnya ditentukan oleh kinerja Bappeda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kinerja Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Medan; (2) faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda. Penelitian ini menggunakan metodologi subjektif dengan mengambil setting atau wilayah eksplorasi di Kantor Bappeda Kota Medan. Strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan teknik wawancara, persepsi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bappeda Kota Medan sudah menunjukkan kinerjanya dengan sangat baik, terbukti dengan terlaksananya setiap tugas dan fungsi yang diberikan kepada Bappeda. (2) terdapat beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilakukan Bappeda, seperti faktor usia, faktor pendidikan dan faktor pekerjaan.

**Kata Kunci:** *Kinerja Bappeda, Partisipatif dan Perencanaan Pembangunan*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih terus berkembang pesat dalam segala bidang perbaikan. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, pemerintah tidak hanya mencari perbaikan nyata seperti pembangunan jalan dan transportasi umum untuk seluruh daerah, tetapi otoritas publik juga terlihat untuk membina sifat SDM. Kemajuan sifat SDM berencana untuk bekerja dengan arah perbaikan di Indonesia. Untuk membangun suatu perbaikan daerah harus ada perbaikan dari otoritas publik dalam bentuk apapun, mengingat dengan kerangka pemerintahan yang layak dan standar, kemajuan provinsi dapat dilakukan (Iskandarsyah, 2018).

Pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan atau melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih unggul. Seperti yang dikemukakan oleh Rogers (2009), pembangunan adalah perubahan yang bermanfaat menuju kerangka sosial dan keuangan yang dipilih sebagai keinginan suatu negara. Sedangkan menurut S.P. Siagian (2012), pembangunan adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh suatu negara, negara, dan pemerintah dalam

rangka mencapai tujuan umum melalui pembangunan dan perubahan yang teratur menuju masyarakat yang mutakhir.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga khusus daerah di bidang ujian dan penataan kemajuan provinsi yang dimotori oleh seorang pimpinan organisasi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam organisasi pemerintahan provinsi di bidang eksplorasi dan penataan perbaikan lokal. BAPPEDA mempunyai tugas menyelenggarakan perkumpulan ketangkasan untuk kesiapan dan pelaksanaan penataan provinsi di bidang penataan kemajuan metropolitan. BAPPEDA sebagai penyelenggara harus memiliki pilihan untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang. Dengan cara ini, seorang pembuat rencana perbaikan diharapkan memiliki informasi dan pengetahuan yang luas dalam perbaikan suatu daerah mengingat semua kemungkinan yang akan dipindahkan oleh daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat memiliki motivasi untuk ikut serta mengambil bagian dalam pembangunan. Menurut

Ndraha (2011), pelaksanaan partisipasi daerah yang sedang dikembangkan sangat penting dalam setiap tahap progresif mulai dari tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, dan tahap penilaian. Sementara itu, menurut Parwoto (1997), partisipasi adalah kontribusi penuh dalam suatu kepastian yang berubah menjadi kesepakatan bersama antar individu dalam satu kelompok/antar kelompok.

Penelitian ini di fokuskan pada kinerja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam hal peningkatan kualitas perencanaan partisipasi pada perencanaan pembangunan Kota Medan. Pelaksanaan perencanaan partisipasi di Kota Medan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kejadian yang terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal pada tahun 2021, di mana program perencanaan pembangunan yang dibuat oleh BAPPEDA belum dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertugas. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari salah satu masyarakat di Kelurahan Tanjung Rejo, bahwa adanya kesalahpahaman di lapangan antara pihak pelaksana pembangunan dengan masyarakat setempat sehingga memperlambat proses pembangunan di Kecamatan

Medan Sunggal. Faktor lain yang menghambat pembangunan di Kelurahan Tanjung Rejo yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat akan pembangunan daerah. Masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo tidak seluruhnya ikut aksi massal dan sumbangan dalam bentuk kerja terhadap pembangunan daerah sebagai bentuk partisipasi masyarakat (Davis, 2003).

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Medan pada tahun 2021, yang terkait dengan langkah ketiga menuju tahap pokok dari proses penataan kemajuan dalam Peraturan No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan daerah (mitra) dan menyesuaikan rencana kemajuan yang dibuat oleh setiap tingkat pemerintahan melalui Musyawarah Penataan Perbaikan (Musrenbang). Beberapa program kerja BAPPEDA pada tahun 2021, diantaranya; (1) program penanggulangan banjir, (2) program perbaikan jalan, (3) program peningkatan kebersihan, (4) program peningkatan Kawasan heritage, dan (5) program peningkatan Kesehatan. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) belum melibatkan seluruh masyarakat

secara penuh baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan sehingga tingkat partisipasi dan kontribusi daerah dalam penataannya masih rendah.

Dalam kegiatan Musrenbang yang dilakukan, energi kerjasama antara DPRD dan daerah diharapkan dapat melakukan tindakan yang baik untuk membuat keseimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan partisipasi daerah yang tinggi. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta tindak lanjut dan pemeliharannya tidak dapat terlaksana dengan baik. Pada hasil pengamatan di lapangan, peneliti melihat bahwa masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan masukan maupun tanggapan terhadap setiap pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA sehingga berdampak pada kualitas perencanaan partisipatif pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menarik rincian masalah, antara lain: Bagaimana kinerja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Medan?; (2) Faktor-faktor apa saja

yang menghambat partisipasi masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA di Kota Medan?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Medan; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kualitas perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh BAPPEDA terhadap setiap pembangunan di Kota Medan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Partisipasi**

Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, kontribusi, atau pengalaman pendidikan bersama untuk memahami, membedah, merencanakan dan bergerak oleh berbagai individu daerah. Menurut Parwoto (1997), partisipasi adalah kontribusi penuh dalam suatu kepastian yang telah berubah menjadi pemahaman bersama antar individu dalam satu pertemuan/antar pertemuan. Sementara itu, menurut Cohen dan Uphoff (2003), bahwa: partisipasi harus terlihat dari sudut

pandang yang berbeda (point of view), keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program, menilai program dan mengambil manfaat dari program.

Menurut Davis (2003), jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat, biasanya sebagai administrasi.
2. Hadiah tanpa batas sebagai uang tunai dan barang dagangan.
3. Menata usaha yang sifatnya bebas dan penyumbanganya berasal dari pemberian orang/kantor yang berada di luar iklim tertentu (pendukung, pihak luar).
4. Merumuskan suatu usaha yang bersifat independen, dan didukung sepenuhnya oleh daerah setempat (biasanya diakhiri dengan pertemuan lokal, antara lain, pertemuan kota yang memutuskan rencana pengeluaran).
5. Hadiah sebagai pekerjaan, yang biasanya diselesaikan oleh spesialis terdekat.
6. Kegiatan massal.
7. Mengarahkan kemajuan di antara keluarga kotaitu sendiri.
8. Buat proyek area lokal yang independen.

Menurut Moeljarto (2003), partisipasi sangat penting, karena:

1. Individu adalah fokus utama dan

tujuan ekstrim dari perbaikan, kerjasama adalah hasil yang koheren dari pertentangan ini.

2. Dukungan meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas individu untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam pilihan-pilihan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Kerjasama membangun iklim masukan untuk perkembangan data tentang perspektif, tujuan, kebutuhan dan keadaan lokal yang tanpanya tidak akan terungkap. Perkembangan data ini tak terhindarkan untuk pergantian peristiwa yang bermanfaat.
4. Perbaikan diselesaikan lebih baik dengan memulai dari mana individu berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Kerjasama dalam memperluas zona (pengetahuan) penerima manfaat proyek kemajuan.
6. Investasi akan memperluas jangkauan organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak ke seluruh area lokal.
7. Dukungan mendukung perbaikan.
8. Dukungan memberikan iklim yang membantu baik realisasi potensi manusia maupun pembangunan manusia.
9. Investasi adalah metode yang ampuh untuk membangun batas wilayah lokal sehubungan dengan

administrasi proyek perbaikan untuk memenuhi persyaratan khusus dari kabupaten.

10. Dukungan dipandang sebagai kesan mayoritas aturan hak orang untuk terlibat dengan giliran mereka sendiri acara.

### **Perencanaan Pembangunan**

Ginjar Kartasmita (1997:48), mengatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tugas mendasar dalam organisasi atau pelaksana perbaikan. Pengaturan sangat penting karena kebutuhan pengembangan lebih menonjol daripada aset yang tersedia. Melalui penataan, kita perlu memikirkan latihan-latihan pengembangan yang secara mahir dan benar dapat memberikan hasil yang ideal dalam menggunakan aset yang tersedia dan menciptakan potensi yang ada.

T. Hani Handoko (2006), mengungkapkan bahwa ada dua tujuan esensial yang melatarbelakangi perlunya perencanaan.

1. Perencanaan dilakukan untuk mencapai "keuntungan defensif" yang terjadi karena mengurangi kemungkinan kesalahan dalam navigasi.
2. Perencanaan dilakukan untuk mencapai "keuntungan positif"

melalui perluasan kemajuan dalam mencapai tujuan hierarkis.

Menurut Tony Killick (2002), ada 6 (enam) sifat dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan kemajuan menyajikan target strategi pemerintah, terutama dengan penekanan pada perputaran keuangan;
2. Prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus dikenali, dan perbedaan ini dimulai dengan satu tempat kemudian ke tempat berikutnya sesuai dengan keadaan setiap daerah;
3. Suatu pengaturan harus dilakukan dengan andal seperti yang ditunjukkan oleh aturan yang terkoordinasi;
4. Mengatur upaya untuk memahami dan mempengaruhi seluruh keberadaan ekonomi;
5. Suatu pengaturan yang menggunakan model makroekonomi untuk memperkirakan presentasi moneter yang ideal;
6. Penataan harus dipisahkan oleh kerangka waktu tertentu, misalnya saat ini, jangka menengah, dan jangka panjang.

Menurut Kunarjo (2002) perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Mengatur sudut pandang sebagai

rencana perbaikan berdasarkan apa yang telah ditulis dalam resep atau garis besar dengan menghindari pembaruan ke basis untuk menghindari perubahan pada pengaturan umum. Dengan menggunakan pemeriksaan sudut pandang hasil informasi, tujuan dan faktor-faktor yang telah ditetapkan harus diikuti, kecuali jika ada perubahan yang tidak dapat disangkal dalam koefisien khusus. Pengaturan seperti ini biasanya sangat tidak kaku, tujuannya harus tercapai sesuai dengan apa yang telah diatur.

2. Penataan ciri dimana penyusunan tujuan berarti apa yang ingin dicapai. Meski tampaknya penataan ini sepenuhnya bisa disesuaikan, bukan berarti penyimpangan dari target program bisa dilakukan tanpa hambatan. Penataan model ini memiliki prasyarat seperti mendorong tujuan, memiliki permintaan kebutuhan, dan tidak bergantung pada model yang tidak kaku. Model penataan ini biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang yang menggabungkan Indonesia dengan Musrenbang.

Menurut Peraturan UU No. 25-2004, perencanaan pembangunan dapat dicirikan dari kata penataan dan

perbaikan. Mengatur adalah interaksi untuk memutuskan langkah masa depan yang sesuai, melalui pengelompokan keputusan, dengan mempertimbangkan aset yang dapat diakses. Pemajuan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seluruh bagian negara untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu, kerangka penataan perbaikan publik adalah sistem penataan perbaikan yang disatukan untuk menciptakan rencana kemajuan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilakukan oleh komponen pimpinan negara dan daerah di tingkat pusat dan provinsi (Pasal 1 UU No. Peraturan 25-2004).

### **Kinerja Bappeda**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Development Planning Agency at Sub-National Level* ini merupakan suatu lembaga khusus daerah di bidang penyelenggaraan dan perbaikan provinsi yang dimotori oleh suatu pimpinan organisasi yang berada di bawah dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah. BAPPEDA Kota Medan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

pendekatan khusus di bidang penataan, penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, kerja sama dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan kemajuan kota Medan.

Susunan BAPPEDA tergantung pada Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 1980 tentang Landasan Lembaran Penyusunan Kemajuan Provinsi di Daerah Tingkat I dan II, yang sekarang disebut daerah dan masyarakat lokal/perkotaan di seluruh Indonesia. Premis tersebut kemudian dikonvergensi dengan PP RI No. 41 Tahun 2007 tentang Perhimpunan Majelis Mekanikal Daerah, bagian keempat Pasal 6 tentang Penataan Organisasi Peningkatan Kewilayahan. Secara keseluruhan, BAPPEDA adalah lembaga non-departemen yang langsung di bawah koordinasi dan sepenuhnya cakap kepada kepala provinsi. Tidak hanya itu, BAPPEDA juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sangat penting bagi Himpunan Tenaga Kerja Daerah (OPD). Kehadiran BAPPEDA juga sering disinggung sebagai komponen penunjang administrasi di bidang penataan pembangunan daerah.

Berdasarkan PERGUB Nomor 11 Tahun 2019 tentang TUPOSI BAPPEDASU, maka fungsi

BAPPEDA adalah:

1. Pelaksanaan perincian pengaturan khusus untuk pengaturan kemajuan provinsi.
2. Menyelenggarakan kesiapan mengantisipasi kemajuan aset manusia dan sosial sosial, persiapan keuangan, aset laut dan reguler, membuat pengaturan kantor wilayah dan yayasan, mengendalikan dan menilai pengaturan peningkatan provinsi.
3. Pelaksanaan pengarah dan pelaksanaan usaha-usaha di bidang penataan kemajuan provinsi.
4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penataan wilayah.
5. Pelaksanaan administrasi otoritatif ke dalam dan ke luar.
6. Melakukan berbagai usaha yang dibagikan oleh perwakilan Pemimpin sesuai dengan kewajiban dan kemampuan mereka.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu dieksplorasi. Menurut Emzir (2010) penelitian kuantitatif adalah penelitian lapangan atau eksplorasi interpretatif yang berasal dari keyakinan, untuk situasi

ini informasi dibuat menurut sudut pandang sosial dan bahwa informasi pemahaman sosial adalah siklus logis yang asli. Dalam eksplorasi subjektif, ilmuwan bertindak sebagai instrumen pemeriksaan sebagai lawan dari pemeriksaan kuantitatif yang melakukan pemeriksaan terukur untuk menjawab perincian masalah.

Dalam penelitian kualitatif, tempat sumber informasi sebagai orang (aset) memegang peranan penting sebagai orang yang memiliki data. Spesialis dan orang aset di sini memiliki kedudukan yang sama, sehingga individu aset tidak hanya memberikan reaksi atas apa yang ditanyakan ilmuwan, namun ia dapat memilih arah dan selera dalam memperkenalkan data yang dimilikinya. Karena posisi ini, sumber informasi sebagai orang dalam penelitian kualitatif disinggung sebagai saksi. Sumber dalam penelitian adalah individu atau penghibur yang benar-benar tahu dan ahli tentang masalah ini, dan terlibat langsung dengan masalah eksplorasi. Sumber-sumber dalam tinjauan ini, secara spesifik: (1) Kepala Pemeriksaan dan Pengkajian Informasi; (2) Persiapan Utilitarian; (3) Mengatur Pemeriksaan, Penilaian dan Pembukaan.

Dalam tinjauan ini, prosedur pengumpulan informasi diselesaikan dalam wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan badan perencanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja Bappeda dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah daerah serta aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Profil Bappeda Kota Medan**

Bappeda Kota Medan beralamat di Kantor Walikota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Bappeda Kota Medan memiliki kemampuan untuk menyusun strategi dalam penataan kota metropolitan, selain itu Bappeda juga menyiapkan contoh fundamental pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPMD, RKPD, RENSTRA, RENJA. Sesuai Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2001 dan dalam pemilihan Ketua Kota Medan, Bappeda dipercaya membantu Ketua dalam perbaikan Kota Medan dan penilaiannya.

##### **Visi dan Misi Bappeda Kota Medan**

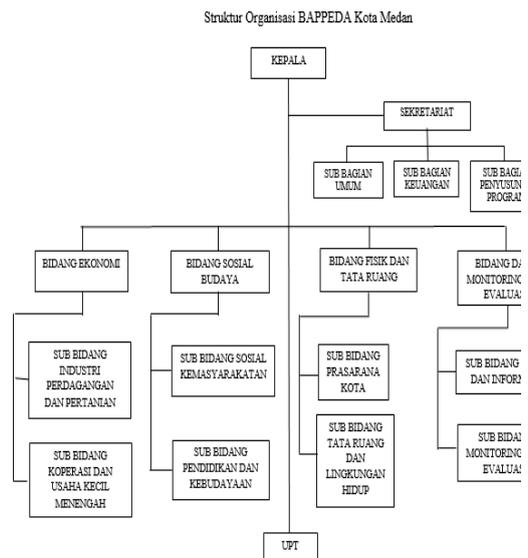
Visi Bappeda Kota Medan adalah: “Terwujudnya Bappeda yang Profesional dan Partisipatif Mendukung

Untuk memahami visi tersebut, Bappeda Kota Medan memiliki misi sebagai berikut:

1. Bekerja pada sifat aksesibilitas rencana perbaikan merupakan langkah penting dilaksanakan dengan tujuan bahwa rencana pembangunan metropolitan dikoordinasikan untuk mengatasi masalah formal, namun tergantung pada kebutuhan material. Secara bersamaan, pengaturan elektif dan rincian program serta latihan dan tidak diatur dalam rencana keuangan untuk administrasi publik.
2. Bekerja pada kelayakan memperkirakan, mengamati, menilai, dan meliputi pencapaian pelaksanaan perbaikan kota, yang merupakan siklus dewan perbaikan kota yang dikoordinasikan untuk mendapatkan informasi dan data bahwa pelaksanaan pelaksanaan penataan adalah seperti yang baru-baru ini rencana yang diselesaikan, serta memberikan kritik untuk siklus penyusunan berikutnya.
3. Bekerja pada penggabungan dan

koordinasi rencana kemajuan adalah pekerjaan untuk membangun nilai ideal dari setiap penggunaan aset perbaikan yang digunakan baik skala penuh maupun miniatur. Penggabungan dan koordinasi itu sendiri bertujuan untuk mengatur tujuan-tujuan publik dan provinsi dalam pergantian peristiwa yang progresif, sehingga rencana pelaksanaan dan pelaksanaan yang berbeda dapat direncanakan.

### Struktur Bappeda Kota Medan



### Bagaimana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kota Medan

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

merupakan hasil kerja sebuah lembaga khusus daerah di bidang eksplorasi dan penataan wilayah yang dimotori oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan sudah menunjukkan kinerjanya dengan baik khususnya dalam hal meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Hal itu ditegaskan oleh Bapak Novand Rindo Sebayang, S.Si, M.E, MPP dalam wawancara yang peneliti lakukan, Ia mengatakan bahwa *“Sejauh ini kinerja Bappeda Kota Medan sudah sangat baik dan terus meningkat, yaitu dapat terlihat dengan terlaksananya setiap tugas dan fungsi yang diberikan kepada BAPPEDA. Bappeda telah membuat dan merancang banyak program-program pembangunan yang akan dilakukan di setiap daerah, menyusun dan menyelenggarakan setiap perencanaan pembangunan tersebut dengan baik serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan. Bappeda juga membantu Bupati/Walikota Medan dalam hal*

*menunjang perencanaan pembangunan Kota Medan. Terlihat saat ini, Kota Medan sudah melakukan banyak pembangunan ke setiap daerah-daerah guna mewujudkan misi dan visi Kota Medan. Dalam hal meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, BAPPEDA selalu berpedoman dari setiap laporan dan usulan- usulan dari masyarakat mengenai pembangunan yang sudah dilakukan, agar kedepannya perencanaan pembangunan bisa dilakukan dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya”.*

Kinerja BAPPEDA merupakan elemen penting dan awal dari hasil pencapaian tujuan di berbagai bidang. Salah satu jenis perkiraan hasil presentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) harus dilihat dari bagian pelaksana kemampuannya. Dimana setiap pelaksanaan latihan yang berbeda sangat mempengaruhi dan mempengaruhi definisi pengaturan kemajuan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa BAPPEDA Kota Medan sudah menjalankan setiap tugas dan fungsinya dengan baik. Hal itu bisa peneliti lihat dari banyaknya program-program perencanaan pembangunan yang dilakukan serta pengawasan dan

pembinaan yang BAPPEDA berikan terhadap setiap pembangunan. BAPPEDA juga selalu menerima setiap usulan- usulan dari masyarakat yang kemudian ditampung dan dimasukkan kedalam RKPD untuk digunakan di tahun berikutnya.

Tak bisa bahwa BAPPEDA memegang peran penting dalam pengaturan perbaikan wilayah. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Danny Pratomo, S.Si., M.Si yang mengatakan bahwa “*BAPPEDA Kota Medan sudah menjalankan perannya dengan baik dalam hal perkembangan dan kemajuan daerah dari segi pembangunan, mengingat kami (BAPPEDA) memiliki tugas dan fungsi untuk ikut membantu Walikota Medan dalam mengembangkan dan memajukan Kota Medan dari segi pembangunan. BAPPEDA membantu melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan daerah, mengkoordinasikan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT RW daerah dan RPJMD daerah, serta*

*mengfasilitasi Rancangan Renstra Perangkat daerah. Namun dalam menjalankan perannya, kami selalu menyesuaikan sesuai standar perencanaan pembangunan yang ditetapkan sehingga pembangunan dari perencanaan tersebut dapat sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan untuk kemajuan Kota Medan baik dari segi pembangunan maupun peningkatan sumber daya manusia”.*

### **Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA di Kota Medan**

Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, kontribusi, atau pengalaman pendidikan bersama untuk memahami, membedah, merencanakan dan bergerak oleh berbagai individu daerah. Menurut Parwoto (1997), partisipasi adalah kontribusi penuh dalam suatu kepastian yang telah berubah menjadi pemahaman bersama antar individu dalam satu pertemuan/antar pertemuan. Partisipasi daerah sangat penting dalam pelaksanaan kemajuan. Tanpa partisipasi yang dinamis dari daerah, perencanaan pembangunan yang terletak pada pengakuan bantuan pemerintah individu tidak akan

dipahami, mengingat individu lebih tahu tentang kebutuhan mereka dan bagaimana mengatasi masalah perbaikan yang terjadi di daerah. arena publik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan terhadap program pembangunan terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah usulan yang di sampaikan. Pada tahun 2021 terdapat sampai 7996 usulan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya yaitu tahun 2022, ini baik untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur maupun pengembangan masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan ibu Astri Retno Artharini, S.T yang mengatakan bahwa *“Sejauh ini pada pelaksanaannya di lapangan, masyarakat cukup antusias untuk berpartisipasi dalam setiap program kegiatan Bappeda Kota Medan yang melibatkan masyarakat, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang diusulkan pada saat Musrenbang Kelurahan. Dengan kata lain, semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang semakin peduli untuk turut berpartisipasi dalam agenda perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Medan”*.

Ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Medan, salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA. Dari hasil wawancara dengan bapak Danny Pratomo, S.Si., M.Si yang mengatakan bahwa *“Sampai saat ini yang kami temukan disetiap*

*daerah, ada beberapa factor yang menghambat dari pada partisipasi masyarakat terhadap setiap program perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA. Pertama factor usia, dimana seseorang yang memiliki usia lanjut akan mempengaruhi partisipasinya terhadap pembangunan yang dilakukan. Kemudian factor Pendidikan, dimana factor bisa mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, sehingga ketika adanya musrenbang mereka lebih memilih tidak ikut serta dan mencari kegiatan lainnya. Dan yang terakhir adalah factor pekerjaan, dimana banyak masyarakat yang lebih sibuk terhadap pekerjaannya masing-masing sehingga mereka tidak bisa hadir dalam musrenbang yang*

diadakan dan bahkan dalam proses pembangunan”.

## 5. SIMPULAN

Hasil dari penelitian kinerja BAPPEDA Dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif pada Perencanaan Pembangunan di Kota Medan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Medan sudah sangat baik dan terus meningkat, hal itu terlihat dengan terlaksananya setiap tugas dan fungsi yang diberikan kepada BAPPEDA. Ada banyak program-program perencanaan pembangunan yang dibuat oleh BAPPEDA, dan terbukti sampai saat ini banyak pembangunan yang sudah dilakukan di setiap daerah Kota Medan.
2. Ada beberapa factor yang menghambat partisipasi masyarakat terhadap setiap pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA di Kota Medan, yaitu faktor usia, faktor Pendidikan, dan faktor pekerjaan. Faktor- faktor ini lah yang banyak ditemui oleh BAPPEDA sehingga mengurangi tingkat partisipasi masyarakat terhadap setiap pembangunan yang

dilakukan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Arthur Simanjuntak, Ivo Maelina Silitonga, 2020. *Dampak Pekerjaan Organisasi Penataan Kemajuan Teritorial Terhadap Sifat Persiapan Partisipatif dalam Kerangka Penataan Perbaikan (Analisis Kontekstual Organisasi Penataan Perbaikan Provinsi di Rezim Langkat)*.
- Fadila, O. A., Khalijah, S., & Umar, T (2018). *Efektivitas peran Bappeda Dalam Pembangunan kota Medan*.
- Much Taufik, HP-Ismani. 2010. *Tugas Bappeda dalam Menggarap Sifat Persiapan Partisipatif dalam Kerangka Penataan Perbaikan di Kota Blitar, Social and Helpful Diary*
- Santoso, Sastropoerto. 1998, *Support in Correspondence, Influence and 98 Development Logical Diary of Improvement Masalah Keuangan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019 Disiplin Dikembangkan, Lulus kelas, Bandung*.
- Sastropoetro, Santoso R. A, 1998. *Dukungan, Korespondensi, Pengaruh dan Disiplin dalam*

- Acara Pergantian Umum, Bandung: Kelas Lulus.*
- Soemarmo. 2005. *Kajian Pelaksanaan Metodologi Partisipatif dalam Siklus Penataan Perbaikan di Kota Semarang (Analisis Kontekstual Pelaksanaan Kerinduan Daerah di Wilayah Banyumanik), Usulan, Pakar Manajemen Kebijakan, Perguruan Tinggi Diponegoro, Semarang.*
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok*, Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP
- Teuku Rizam, 2019. *Peranan Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Aceh Timur.*
- Wibisana, Gunawan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Peremajaan Pasar*, Institut Teknologi Bandung: Bandung, 1989.
- Buku:**
- Abe, Alexander, 2001, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, penerbit Pondok Edukasi, Solo
- Arsito, 2004. *Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Demokratis.*
- Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah.* Yogyakarta: BPFE.
- Bappeda Kota Medan (2022). *Laporan kinerja badan perencanaan pembangunan daerah 2021.* Bappeda Kota Medan.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996, *Penguatan Daerah Lokal: Ide Peningkatan Didirikan di Daerah Lokal.* Jakarta: Organisasi Penataan Perbaikan Publik.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.* Jakarta; Universitas Indonesia UI Press.
- Mikkelsen, Britha, 2005, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nasution, M.Arifin. 2007. *Penataan PerbaikanPartisipatif, Medan.*
- Oakley, Peter, dkk, 1991. *Proyek Dengan Individu, Tindakan Dukungan dalam Peningkatan Negara.* Jenewa: Kantor Kerja Global.
- Pasaribu, I.L, dan Simajuntak. B., 1992., *Sosiologi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.

Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004.

*Penataan Peningkatan Wilayah,  
PT. Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta.*

Siagian, Anak. P, 1980, *Peningkatan  
Organisasi, Gunung Agung,  
Jakarta.*

Slamet. Y., 1999, *Konsep Dasar  
Partisipasi Sosial.* PAU-SS, UGM,  
Yogyakarta. (2016). *Metode  
penelitian kualitatif dan  
pembelajaran alfabeta (vol.1)*  
Bandung: Alfabeta

**Peraturan Perundang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun  
2004, *Tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional.*